



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARINI HARIMURTI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 208040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.040.059.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/434 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.196.494.000
2. Tanah Seluas 2019 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 54.513.000
3. Tanah Seluas 2076 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 41.520.000
4. Tanah Seluas 2018 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 54.486.000
5. Tanah Seluas 1635 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 261.600.000
6. Tanah Seluas 3770 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 52.780.000
7. Tanah Seluas 718 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 91.904.000
8. Tanah Seluas 2019 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 54.513.000
9. Tanah Seluas 1554 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 41.958.000
10. Tanah Seluas 1490 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.230.000



11. Tanah Seluas 1542 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp.
41.634.000
12. Tanah Seluas 479 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
61.312.000
13. Tanah Seluas 1745 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp.
47.115.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **197.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX-5 MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **76.200.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **570.034.311**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.883.293.311**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.883.293.311**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.